



**SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL**  
**KERJASAMA PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN**  
**ANTARA**  
**KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta  
Jl. Malioboro No. 14 Yogyakarta 55213, Telp. 0274 - 557064, 0274 - 557423, Fax. 0274 - 557064

No. : 005 /Sekber/Ext/1/2024

KepadaYth.

**Mantri Kemantren Umbulharjo**  
Jl. Glagahsari No. 99 Yogyakarta

Hal : **Pengiriman Dokumen Sekber Kartamantul**

Dengan Hormat,

Berikut ini kami sampaikan dokumen berupa Buletin Sekber Kartamantul Edisi 3 dan 4 Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) eksemplar, yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam membangun, menyeimbangkan dan menyelaraskan Pembangunan Perkotaan dengan semangat kebersamaan. Kami berharap Buletin ini dapat bermanfaat bagi Bapak/Ibu dan jajaran instansi Pemerintah.

Demikian dokumen ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Sekretaris,

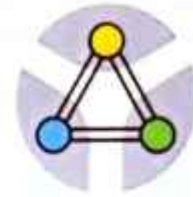


Agus Tri Haryono, S.T., M.T.

Buletin

# Kartamantul

Kelompok Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan  
 Area Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul



Menyempatkan, Menyeimbangkan dan Menyelaraskan Pembangunan Perkotaan dengan Semangat Kebersamaan

## Menilik jaringan PDAM lintas KARTAMANTUL



Layanan PDAM lintas kabupaten/kota adalah hal unik yang terjadi di KARTAMANTUL. Masing-masing memiliki pelanggan dari daerah lain yang secara jarak berdekatan. Namun demikian, pengaturan secara resmi terkait kondisi tersebut belum tersedia. Sebagai upaya untuk memberikan penguatan atas kondisi unik tersebut, maka SEKBER KARTAMANTUL bersama kabupaten/kota sedang menyiapkan substansi Perjanjian Kerja Sama (PKS), salah satunya melalui kegiatan survei bersama.

Berdasarkan hasil survei bersama tersebut, dapat diketahui tipe layanan PDAM lintas yang mungkin dikembangkan. Tipe layanan lintas antara lain:

1. Pengembangan SR diprioritaskan sesuai dengan domisili atau atas permintaan warga yang disertai rekomendasi PDAM domisili. Area Kota Yogyakarta: Karangwaru; area Kabupaten Sleman: Gandu, Balecatur, Banyuraden, Caturtunggal, Sinduadi; area Kabupaten Bantul: Tamanan, Wirokerten, Banguntapan.
2. Pengembangan SR *hybrid*/sistem jual beli air (dengan MoU), yaitu pipa SR disediakan oleh PDAM domisili sementara suplai air berasal dari PDAM terdekat. Area Kabupaten Bantul: Pedak Baru.
3. Pengembangan jaringan dan SR oleh PDAM terdekat dengan rekomendasi dari PDAM domisili: Area Kabupaten Bantul: Jagalan, Singosaren.

Layanan lintas harapannya dapat memuat informasi rincian jumlah SR dan jaringan pipa terakhir di area lintas. Informasi tersebut selanjutnya dilakukan pembaharuan secara rutin oleh tiap PDAM. Selain itu juga memuat ketentuan pembangunan pipa secara sejajar dan berjarak/spasi untuk posisi jaringan PDAM yang saling berdekatan.



*"We never know the worth of water till the well is dry"*  
 - French Proverb -

## Menyusun Skenario Desentralisasi Pengelolaan Sampah



Kebijakan pengelolaan sampah regional KARTAMANTUL mengalami perubahan signifikan pada akhir Agustus lalu. PEMDA DIY menggagas kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten/kota dan melepas rencana KPBU TPA Piyungan. Kebijakan tersebut mendelegasikan tanggungjawab pengelolaan sampah kepada kabupaten/kota dan menyudahi keberadaan TPA - Regional Piyungan.

Sementara beberapa waktu terakhir kebijakan kabupaten/kota ditujukan pada upaya penyediaan sarpras pengurangan sampah di hulu dengan masih mempertimbangkan TPA KPBU. Tidak mudah untuk mengejar target tersebut di saat kabupaten/kota sudah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan skema pengelolaan dari APBD yang terbatas.

Kemungkinan untuk pengurangan sampah di hulu yang disiapkan kabupaten/kota kemungkinan baru bisa terwujud pada akhir tahun 2024, tetapi masih belum bisa melayani 100 % area KARTAMANTUL. Selain itu kabupaten/kota juga masih memikirkan residu sampah yang belum bisa tertangani secara tuntas, sehingga memerlukan keberadaan TPA. Dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kondisi-kondisi yang dihadapi kabupaten/kota tersebut, maka seyogianya PEMDA DIY masih terus ikut andil untuk memudahkan implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. Salah satunya dengan mengupayakan perpanjangan waktu penggunaan TPA transisi 2 untuk pembuangan residu sampah dari kabupaten/kota. Selain itu, dengan mengupayakan pemanfaatan eks lahan KPBU untuk bisa digunakan sebagai area pengelolaan sampah oleh kabupaten/kota.

### Penanganan Drainase di Kawasan Perkotaan Yogyakarta

SEKBER KARTAMANTUL mencoba menggali permasalahan dan rencana penanganan drainase yang sedang kabupaten/kota hadapi dengan melangsungkan audiensi. Selain mengenai obyek drainase di perbatasan KARTAMANTUL, juga mendiskusikan obyek yang bersinggungan dengan infrastruktur kewenangan DIY maupun pusat. Diskusi membahas keseluruhan obyek saluran pengatusan, baik itu drainase lingkungan, drainase jalan hingga saluran irigasi.

Hasil diskusi di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya permasalahan dan rencana penanganan drainase perbatasan di Giwangan dan beberapa ruas jalan seperti Jalan Parangtritis, Kraton - Jln. D.I. Panjaitan, Jalan Bantul – Batas Kota Yogyakarta, Jalan Gedongkuning, Jalan Laksda Adisucipto hingga Jalan Jambon. Kabupaten Bantul sedang berupaya mengatasi permasalahan drainase antara lain di Jalan Krapyak – Glugo dan Jalan Druwo – Batas Kota Yogyakarta. Sementara untuk skala lebih luas Bantul berupaya dengan menyiapkan *masterplan* drainase pada tahun 2024. Selain Kota Yogyakarta, permasalahan drainase Jalan Jambon juga dirasakan Kabupaten Sleman.

Tahun 2023 ini, Bantul menangani drainase di ruas Jalan Krapyak-Glugo. Sementara Kota Yogyakarta menangani drainase Jalan Gedongkuning sisi timur (Simpang Kusumanegara – Simpang PLN), Jalan Bener sisi selatan, serta saluran irigasi DI Sidomulyo di sekitar Mendungan. Selebihnya merupakan kegiatan pemeliharaan rutin oleh kabupaten/kota.

Sebagian besar permasalahan drainase kabupaten/kota terletak pada sulitnya akses pengatusan air yang melewati gorong-gorong Jalan Ring Road Selatan. Oleh karenanya, Kota Yogyakarta mengusulkan penanganan drainase Jalan Ring Road Selatan dengan membuat ring saluran air hujan di sisi utara/hulu ring road. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan Kabupaten Sleman, mendapatkan beberapa gagasan alternatif penanganan drainase dengan: 1) menitikpkan aliran drainase ke irigasi; 2) membuat resapan pada saluran drainase; 3) menyatukan drainase dan irigasi disertai pengaturan/manajemen; 4) penertiban fungsi saluran drainase.

## Diskusi Panjang Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul untuk Membuka Peluang Perbaikan Jalan Widuri

Catatan aset jalan di perbatasan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta: a. Jln. Widuri → aset tanah, sertifikat tanah belum tersedia. b. Jln. Dongkelan → aset jalan dan aset tanah, sertifikat tanah belum tersedia.

Sedikit kilas balik mengenai obyek jalan di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, tepatnya berada di antara Kelurahan Ngestiharjo dan Kelurahan Bener yang pada beberapa waktu terakhir perlu ada perbaikan namun kewenangannya masih simpang siur. Setelah melakukan survei bersama, pendalaman di DPU PKP, Bagian Tapem, Bidang Aset hingga BPN maka perlahan mendapat pencerahan. Permendagri Nomor 15 tahun 2012 memastikan bahwa Jalan Widuri dan Jalan Dongkelan masuk wilayah administrasi Kabupaten Bantul. Jalan Dongkelan masuk dalam pembukuan aset jalan dan aset tanah serta masuk dalam SK jalan Kota Yogyakarta yang baru. Sementara Jalan Widuri terdapat dalam pembukuan aset tanah dan tercatat dalam SK Jalan yang lama. Guna memudahkan penanganan di kemudian hari, perlu segera menentukan siapa yang berwenang.

Mempertimbangkan bahwa Jalan Widuri masuk administrasi Kabupaten Bantul, maka sempat terdapat opsi pemindahan aset dengan mekanisme hibah. Namun demikian, setelah mempertimbangkan bahwa suatu daerah dapat memiliki aset di luar batas administrasinya, maka Kota Yogyakarta memilih opsi untuk tetap mencatatkan aset Jalan Widuri. Sebagai tindak lanjut, Kota Yogyakarta akan mengurus kelengkapan dokumen pendukung catatan aset tanah dan aset jalan lalu menyematkan Jalan Widuri dalam SK jalan. Adanya keputusan Kota Yogyakarta dengan opsi mempertahankan aset Jalan Widuri, maka kewenangan peningkatan dan pemeliharaan jalan berikutnya ada pada Kota Yogyakarta.



Sebelum dilakukan pemeliharaan (Des, 2022)



Setelah dilakukan pemeliharaan (Des, 2023)

"We all do better when we work together and invest in our future"  
- Elizabeth Warren -



Jumlah sambungan rumah (SR) IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2023 meningkat dengan proporsi yang berbeda di tiap kabupaten/kota. Tahun 2023 jumlah SR mencapai 27.061 dengan rincian Kota Yogyakarta sebanyak 19.831, Kabupaten Sleman sebanyak 3.882 dan Kabupaten Bantul sebanyak 3.348. Jumlah SR tahun 2023 meningkat 722 SR dari tahun sebelumnya. Terdapat penambahan SR sejumlah 586 SR di Kota Yogyakarta, 10 SR di Kabupaten Sleman dan 126 SR di Kabupaten Bantul. Pendanaan SR di Kota Yogyakarta sebagian berasal dari APBD dan yang terbanyak berasal dari Dana

Keistimewaan, di Kabupaten Bantul bersumber dari APBD, sementara untuk Kabupaten Sleman berasal dari swadaya masyarakat. Kapasitas IPAL Terpusat Sewon masih cukup besar untuk bisa memberi layanan pengolahan limbah domestik. Sementara pendanaan dengan skema hibah terbatas. Masyarakat yang memiliki akses terhadap jaringan air limbah IPAL Terpusat Sewon dapat berpartisipasi dengan membuat sambungan rumah secara mandiri/swadaya. Kontribusi masyarakat ini dapat berperan dalam menyelamatkan lingkungan agar tetap berkelanjutan.

### KARTAMANTUL Menyiapkan Antisipasi Lalin Dampak Pembangunan Tol

Berapa tahun ke depan Yogyakarta akan ramai oleh lalu lalang kendaraan proyek pembangunan jalan tol ruas Solo – Jogja – Bandara YIA Kulon Progo. Proyek pembangunan tol tersebut terdiri atas beberapa paket pekerjaan. Pekerjaan terdekat yaitu paket 2.2 ruas Monjali – Gamping (junction Sleman) sepanjang 800 meter, lebih tepatnya di perempatan Trihanggo Sleman. Pihak PT Jasamarga Jogja Solo menargetkan pembangunan selesai pada tahun 2023 – 2024. Sebelum memulai pembangunan, pihak kontraktor terlebih dahulu melakukan pekerjaan penyesuaian kondisi ruas Ring Road Utara antara lain dengan relokasi beberapa utilitas, pembongkaran separator, trotoar dan median jalan. Oleh karena adanya pekerjaan penyiapan di ruas Ring Road Utara, maka ada pengalihan jalur dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut.



Lebih jauh, kajian mengenai manajemen lalu lintas pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo – Jogja – Bandara YIA Kulon Progo hanya sebatas pada pengalihan arus dari ruas jalan di mana proyek berlangsung. Sementara keberadaan proyek pembangunan jalan tol hingga masa operasionalnya nanti akan berdampak besar pada ruas-ruas jalan milik PEMDA DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, perlu adanya kajian penataan lalu lintas baik saat masa

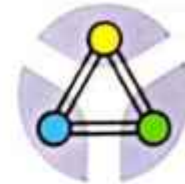
konstruksi hingga operasional jalan tol oleh DIY dan kabupaten/kota. Selain itu, juga perlu menyiapkan beberapa ruas jalan untuk menghadapi pengalihan arus maupun penambahan jumlah kendaraan yang masuk, seperti Jalan Inspeksi Selokan Mataram, Jalan Jambon, Jalan Affandi dan Jalan Jenderal Sudirman.

*"If I complain about a traffic jam, I have no one to blame but myself"*  
- Steve Wynn -

PENERBIT	: Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (KARTAMANTUL)
PENANGGUNG JAWAB	: Nasa Ujjarto Aji, S.Si, M.T.
PENGARAH	: Ir. Aman Yuriadjaya, MM.; Harda Kiswaya, SE., M.Si; Agus Budiraharja, SKM., M.Kes Agus Tri Haryono, ST., MT.; Ir.Dwi Anta Sudbya, M.T.,; Ir. Fenty Yusdayati, MT.
KONTRIBUTOR	: Miftahul Jannah, S.Si, M.Sc.
EDITOR	: Latifah Asri Munawaroh, S.Si.
ALAMAT	: Komplek Pemda DIY, Kepatihan, Danurejan Jl. Malloboro 14 Yogyakarta 55213 Telephone: (0274) 557 423, Facsimile: (0274) 557 064
WEBSITE / INSTAGRAM	: kartamantul.jogjaprov.go.id / kartamantul_official
EMAIL	: kartamantul@gmail.com

# Buletin Kartamantul

Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan  
antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul



Membangun, Menyeimbangkan dan Menyelaraskan Pembangunan Perkotaan dengan Semangat Kebersamaan

## Workshop Perbatasan : Meningkatkan Kebijakan Pengelolaan Sampah



Kabupaten/kota harus bersiap menyikapi perubahan kebijakan pengelolaan sampah dari PEMDA DIY yang semula Sistem Pengelolaan Persampahan Regional menjadi Sistem Jaringan Persampahan Terdesentralisasi dan Terintegrasi. Penerapan desentralisasi pengelolaan sampah akan diberlakukan oleh PEMDA DIY pada tahun 2024. Kewajiban kabupaten/kota untuk melakukan penanganan sampah dari hulu sampai hilir menjadi sangat berat karena keterbatasan waktu, sumberdaya dan pendanaan. Oleh karenanya, keterlibatan seluruh stakeholders, terutama pemerintah pada tingkat kelurahan/kalurahan dalam pengelolaan sampah sangat penting.

Salah satu upaya meningkatkan peran dan kapasitas pelaksana di kelurahan/kalurahan yaitu dengan melibatkan dalam kegiatan workshop pengelolaan sampah. Acara workshop yang diselenggarakan di Hotel Arjuna pada Senin, 13 November 2023 tersebut berjalan lancar. Harapannya, peserta dapat mengambil poin keberhasilan untuk bisa diterapkan di wilayah masing-masing.

Peserta terbagi menjadi 3 tim, yaitu : The Bestari, The Prakarsa dan The Raharja. Kalurahan/kelurahan dalam tim The Bestari belajar untuk bisa memaksimalkan kemampuan kelompok masyarakat dan semangat gotong royong dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kalurahan/kelurahan dalam tim The Prakarsa belajar untuk bisa memulai dan/atau menghidupkan kembali lembaga pengelolaan sampah di wilayah setempat. Kalurahan/kelurahan dalam tim The Raharja belajar untuk bisa memaksimalkan kemampuan finansial dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

*"There is no power for change greater than a community  
discovering what it cares about"*

*- Margaret J. Wheatley -*

## Update dan Peluang Pengembangan Angkutan Publik di KARTAMANTUL



Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki transportasi publik perkotaan bernama Trans Jogja dan sudah beroperasi sejak 2008. Terdapat 21 trayek, sementara tiga di antaranya dioperasikan oleh Teman Bus. Saat ini, 3A (rute Giwangan-Condongcatur) menjadi trayek yang paling banyak jumlah armadanya. Sementara, rute Palbapang-Malioboro menjadi rute baru yang paling ramai peminatnya.

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan alat transportasi. Saat ini, kendaraan pribadi menjadi alat transportasi yang dominan di KARTAMANTUL. Banyaknya kendaraan pribadi menyebabkan jalan penuh sehingga rawan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, transportasi publik menjadi alternatif solusi.



Tujuan semula Trans Jogja yaitu untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat di kawasan perkotaan. Saat ini Trans Jogja sudah melayani hingga Prambanan dan Pakem di Kab. Sleman serta Palbapang di Kab. Bantul. Melihat besarnya peran transportasi publik, maka pemerintah perlu meningkatkan dan memperluas jangkauan transportasi publik layaknya Trans Jogja. Guna mencapai tujuan tersebut, PEMDA DIY dapat melakukan optimalisasi Trans Jogja dengan re-route, pengembangan atau penambahan rute. Kabupaten/kota mengusulkan re-route untuk trayek 12 (Pakem masuk hingga Malioboro), usulan trayek 2 untuk diperpanjang ke Tempel dan trayek 10 dibuat memutar Kridosono. Ketiga usulan re-route tersebut untuk menghubungkan dengan pusat bangkitan (Malioboro) dan atau integrasi dengan moda kereta api. Selain itu juga terdapat usulan rute baru dari Kabupaten Bantul, yakni rute Imogiri – Malioboro.

Kerja sama DIY dengan kabupaten/kota atau pihak lain juga tidak kalah penting. Kerja sama dalam hal sosialisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarpras dan penyediaan feeder. Salah satu skema pembagian peran yaitu penyediaan sarana angkutan perkotaan oleh DIY dan prasarana oleh kabupaten/kota. Saat ini, terdapat sejumlah halte besar yang kurang terpelihara, sayangnya kabupaten/kota tidak memiliki wewenang. Pembagian peran pemeliharaan halte besar oleh DIY dan halte kecil oleh kabupaten/kota juga bisa menjadi alternatif. Selain itu, untuk memperluas jangkauan Trans Jogja, kabupaten/kota dapat menyiapkan angkutan feeder. Usulan angkutan feeder ke kementerian oleh kabupaten/kota bisa dengan model angkutan perintis atau yang serupa.

*"A develop country isn't a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation"*  
- Gustavo Petro -

## Penyiapan Substansi PKS Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) REGIONAL KARTAMANTUL

Pemerintah kabupaten/kota dan PEMDA DIY sedang bersama-sama menyiapkan PKS Penyelenggaraan Air Minum yang baru di SEKBER KARTAMANTUL. Beberapa hal menjadi catatan dalam penyiapan substansi, antara lain mengenai peningkatan serapan dari idle capacity. Debit optimal air SPAM REGIONAL KARTAMANTUL yang tersedia untuk panduan kuota awal dalam PKS yaitu 371,73 lt/dt. Sementara itu, terdapat potensi realokasi kuota berdasarkan sisa yang belum terserap, seperti realokasi dari reservoir Guwo, realokasi setelah IPA Kebonagung beroperasi dan realokasi kuota Kota Yogyakarta. Potensi realokasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk meningkatkan serapan sesuai kondisi aktual masing-masing. Realokasi sebaiknya didahului dengan kajian sederhana sebagai dasar untuk perubahan alokasi kuota.

PARA PIHAK perlu merumuskan target capaian berdasarkan rencana pengembangan. Selanjutnya menuangkan dalam lampiran PKS. Mengingat bahwa PKS merupakan upaya bersama tentunya ada pembagian peran PARA PIHAK, selain kabupaten/kota juga ada PEMDA DIY. Kabupaten/kota mengusulkan agar DIY dapat mengupayakan perpanjangan jaringan untuk memudahkan serapan SR. Terdapat potensi dukungan pendanaan oleh provinsi maupun pusat dalam pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) untuk membantu PDAM



mendekatkan suplai air dan memperluas area layanan dengan pengembangan jaringan, pembangunan reservoir dan tapping sebelum reservoir oftaker/water meter induk. Harapannya dukungan sarpras bisa menyeluruh ke tiga kabupaten/kota dan beban operasional aset bisa berkurang. Beberapa rencana seperti JDU Tambak – Bangunharjo dan JDU Kronggahan ke a) Gemawang, b) Karanggayam, c) Pengok, d) Miliran diusulkan untuk bisa kembali dimasukkan program.

### Permasalahan dan Penanganan Drainase Lintas Kewenangan

Kewenangan masing-masing kabupaten/kota terbatas pada wilayah/area yang masuk secara administratif. Sementara saluran drainase KARTAMANTUL secara geografis dikontrol oleh topografi yang sebenarnya tidak mengenal batas daerah. Selain itu, juga ada sarpras lintas yang menjadi kewenangan PEMDA DIY dan Pusat. Oleh karenanya, perlu sekali bagi ketiga kabupaten/kota serta PEMA DIY dan pusat untuk saling berkoordinasi. Setelah kabupaten/kota mencoba berdialog dengan PEMDA DIY juga perwakilan pemerintah pusat, dapat diketahui beberapa alternatif penanganan. Penanganan oleh pusat secara umum membutuhkan readiness criteria yang memuat informasi permasalahan, kebutuhan, dan bagaimana kesiapan aliran ke hilir. Penanganan keseluruhan, membutuhkan review master plan drainase KPY. Sementara untuk penanganan secara parsial dan insidental mempertimbangkan urgensi/prioritas. Penanganan saluran/gorong-gorong ring road beberapa waktu lalu bisa dilakukan karena saluran dalam kondisi rusak dan perlu ada perbaikan jalan, salah satunya karena penurunan muka jalan.

Selain berupa kegiatan pembangunan/peningkatan, saluran atau gorong-gorong terutama yang melintas ring road perlu pemeliharaan lebih intensif. Untuk itu perlu dukungan berbagai pihak dalam kegiatan pembersihan. Mengingat diameter gorong-gorong yang terlalu kecil untuk petugas kebersihan bisa masuk, maka perlu mencari alternatif cara pembersihan yang lebih efektif dan aman. Lebih lanjut, untuk mengatasi permasalahan drainase secara menyeluruh maka perlu perencanaan yang lebih komprehensif. Maka dari itu, kabupaten/kota mengusulkan review master plan drainase ke BBWS SO, karena memiliki wewenang dalam pengelolaan DAS.



*"Infrastructure investment is a key tool for improving productivity, addressing inequality and building resilience. But it will only deliver these objectives if sustainability is embedded at its core"*

- Antonio Guterres -



## Kunjungan DPRD dan PEMDA Jateng ke SEKBER KARTAMANTUL



Rabu, 13 Desember 2023 SEKBER KARTAMANTUL menerima kunjungan dari perwakilan Komisi D DPRD bersama DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah. Komisi D DPRD bersama DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah melangsungkan sharing bersama SEKBER KARTAMANTUL mengenai pengalaman menjalankan SPAM Regional. Teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah menceritakan bahwa serapan SPAM Bregas sudah mencapai 100% dan saat ini membutuhkan tambahan kapasitas. Jaringan pemanfaatan untuk Mojosongo dan sekitarnya sudah tertata tetapi air dari SPAM Regional belum sampai karena jarak yang jauh dan investasi kurang sesuai. Beberapa tahun APBN untuk pembangunan jaringan belum tersedia. Sementara cakupan pelayanan air bersih di daerah perkotaan masih di bawah target 90%. Salah satu kendalanya karena masyarakat memilih menggunakan SPAM Lokal. Masyarakat membuat sumur-sumur lokal melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga beberapa PDAM terpaksa harus mencabut SR. Lain hal dengan Kedungsepur, terdapat kebijakan khusus yang lebih spesifik yaitu penyiapan SPAM untuk kawasan industri.

### Review Pelaksanaan & Permasalahan PKS Penyelenggaraan Sarpras Jalan



Perjanjian Kerja Sama (PKS) sarpras jalan akan habis masa berlakunya pada tahun 2024. Sementara kabupaten/kota pada beberapa waktu terakhir menemukan adanya beberapa jalan di perbatasan yang perlu diakomodir dalam PKS tersebut. Bersama dengan agenda penyiapan substansi untuk perpanjangan PKS, tim akan memasukkan klausul beberapa jalan kerja sama yang baru. PKS berkedudukan sebagai landasan legal bagi kabupaten/kota dalam penanganan jalan di perbatasan.

Tim teknis mengusulkan untuk memasukkan seluruh ruas jalan di perbatasan. Selanjutnya, menuangkan bentuk kerja sama pada setiap ruas jalan. Namun demikian, tetap ada klausul untuk membolehkan penanganan oleh daerah yang sudah lebih siap secara anggaran, misal dalam force majeure. Selain itu, kabupaten/kota juga berkomitmen untuk mencatatkan pada catatan aset jalan.

SEKBER KARTAMANTUL akan menindaklanjuti dengan mengagendakan survei bersama terutama pada jalan yang terbagi sejajar batas wilayah. Kemudian, menelusuri catatan aset dan sertifikat pada jalan yang terbagi sejajar dengan batas wilayah. Lalu mendiskusikan mekanisme penanganan jalan yang masuk daerah lain bersama dengan OPD terkait.

*"Investment in infrastructure is a long term requirement for growth and a long term of factor that will make growth sustainable"*  
- Chanda Kochhar -

**PENERBIT** : Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (KARTAMANTUL)  
**PENANGGUNG JAWAB** : Nasa Ujiarto Aji, S.Si, M.T.  
**PENGARAH** : Ir. Aman Yuniadijaya, MM.; Harda Kiswaya, SE., M.Si; Agus Budiraharja, SKM., M.Kes  
Agus Tri Haryono, ST., MT.; Ir.Dwi Anta Sudibya, M.T.; Ir. Fenty Yusdayati, MT.  
**KONTRIBUTOR** : Miftahul Jannah, S.Si, M.Sc.  
**EDITOR** : Latifah Asri Munawaroh, S.Si.  
**ALAMAT** : Komplek Pemda DIY, Kepatihan, Danurejan  
Jl. Malioboro 14 Yogyakarta 55213 Telephone: (0274) 557 423, Facsimile : (0274) 557 064  
**WEBSITE / INSTAGRAM** : kartamantul.jogjaprov.go.id / kartamantul\_official  
**EMAIL** : kartamantul@gmail.com